
POLITIK SANTRI TRADISIONAL DAN KEIKUT-SERTAANNYA DALAM KEKUASAAN NEGARA

Oleh : **Mahjuddin**

Abstract

Keikut-sertaan santri tradisional dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dimaklumi oleh warga negara. Bahkan ahli sejarah dari bangsa penjajah juga memakluminya, meskipun tidak banyak ditulis oleh ahli sejarah bangsa kita sendiri.

Sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, santri tradisional yang bertolak dari Pondok Pesantren, sudah berjuang untuk mengusir penjajah. Mereka bersepakat, bahwa haram hukumnya umat Islam dikuasai dan dipimpin oleh orang kafir, sehingga pakaian yang sering dipakai oleh penjajah juga haram dicontoh oleh umat Islam. Itulah sebabnya, pakaian jas dan dasi pada saat itu, diharamkan oleh Kyai tradisional, karena dianggap mencontoh atau menyerupai sikap penjajah (orang kafir).

Seluruh komponen bangsa yang merasakan pahit-getimya akibat penjajahan, karena menguras sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), untuk kepentingan pihak penjajah, maka umat Islam yang paling banyak merasakannya, ditambah lagi dengan pembatasan kegiatan keagamaan yang dituangkan dalam Undang-Undang (Ordinansi) yang sangat menyulitkan umat Islam, sehingga memaksa santri tradisional untuk melakukan perlawanan dengan pemuda muslim yang lain.

Politik santri tradisional di masa ini, tidak untuk merebut kekuasaan negara, tetapi mengusir penguasa (penjajah). Dan pada saat Indonesia merdeka, di mana Belanda masih ingin kembali menjajah Nusantara, lagi-lagi santri tradisional mengangkat senjata bersama-sama dengan TNI, hingga 1950. Ketika pemerintah Orde Lama dengan menganut bentuk Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Terpimpin, santri tradisional banyak terserap di Lembaga Parlemen dengan mewakili Partai NU ketika itu.

Peran politik santri tradisional menurun, tatkala pada Orde Baru, kecuali sebagian kecil yang masih ingin berkiprah di Lembaga politik, dengan cara menyebar di Golkar, PPP dan PDI. Sedangkan Lembaga Eksekutif tidak ada, karena lembaga tersebut dikuasai oleh militer. Kiprah yang begitu besar, takkala perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, di mana santri tradisional mendapatkan kesempatan dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagian kecil ada di Golkar dan di PPP.

Pendahuluan

Santri tradisional adalah ahli agama Islam atau Kyai yang masih sangat terikat dengan pemikiran keagamaan para ulama Fiqh, Tafsir, Hadis, Tauhid dan Tasawuf yang hidup antara abad ke 7 hingga abad ke 13 M. (Zamakhsyari Dhofier; 1985, 1).

Santri tradisional ini, belajar di Pondok Pesantren dengan penguasaan dan pendalaman kitab klasik (kitab kuning), mengenai ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, dan sangat sedikit menemukan ilmu-ilmu umum, terutama Ilmu Tata Negara. Ilmu tersebut hanya bisa dipelajari dalam Ilmu Fiqh, mengenai bab pembahasan *Ahkām al-Sultāniyyah* (Kajian Ketatanegaraan) dalam bentuk yang sangat global dan normatif, sehingga tidak dapat diaplikasikan secara langsung oleh santri tradisional dalam melaksanakan pemerintahan.

Kajian ini tidak membicarakan politik santri modern, yang ikut dalam perebutan kekuasaan di Indonesia, sebagaimana tokoh yang dikader oleh organisasi Muhammadiyah, al Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Karena dapat dimaklumi, bahwa kader dari organisasi keagamaan tersebut, kebanyakan memiliki kemampuan ilmu-ilmu umum, dibandingkan dengan santri tradisional. Dan inilah yang menarik dikaji, dari perilaku politik tokoh yang berbasis Pondok Pesantren klasik (tradisional), semacam Pondok Pesantren yang dikelola oleh Kyai Nahdah al-Ulama (NU).

Meskipun kebanyakan peneliti dari

Barat berkesimpulan, bahwa Islam tradisional di Indonesia mengalami stagnasi (tidak berkembang), tetapi Snouck Hurgronje tetap melihatnya sebagai gerakan yang mengalami kemajuan dalam bidang sosial dan kebudayaan, yang berdasarkan dengan agama, sehingga berhasil membentuk kebudayaan Indonesia modern. (Snouch Horgronje; 1963, 16). Hal yang demikian juga dikemukakan oleh Prof. HARGibb dalam bukunya (HARGibb; 1947, 2).

Keberhasilan santri tradisional dalam menghimpun kekuatan yang besar di Indonesia, karena dalam perjuangannya selalu ramah dan toleran terhadap tradisi masyarakat yang dilaluinya. NU yang paling ramah dan toleran terhadap masyarakat yang berbeda agama dan tradisi, dibandingkan dengan organisasi keagamaan yang lain. Ia tidak merasa melakukan perbuatan haram bila ia menyatakan diri sebagai sub-ordinasi dari kebudayaan dan tradisi masyarakat non-muslim yang ada disekelilingnya, dan berusaha memberi bobot nilai keislaman kedalam tradisi tersebut, tanpa mengubah metodenya, maka itulah yang dimaksudkan sebagai strategi da'wah oleh mereka.

Dari kemampuan santri tradisional menghimpun kekuatan, terutama dipedesaan, maka penjajah Belanda maupun Jepang sangat menaruh perhatian terhadapnya, dan selalu mewaspadainya, sebab dianggap bahwa kekuatan tersebut mampu menghadapi kekuasaan penjajah. Snouck Hurgronje berkali-kali

menyampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bahwa sebenarnya doktrin agama yang ditanamkan oleh Kyai di masyarakat, lewat pendidikan yang berbasis Pondok Pesantren, tidak begitu berbahaya terhadap kepentingan pemerintah Belanda, tetapi yang harus diwaspadai adalah doktrin politik Islam yang dilandasi oleh fanatisme agama, sehingga ia menyatakan, bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik (Aqib Suminto; 1985, 11).

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka pemerintah Belanda di Indonesia bersikap hati-hati terhadap umat Islam, dengan menetapkan kebijakan pemerintahan yang memberikan kebebasan dalam masalah ibadah dan kemasyarakatan, selama tidak mengganggu kepentingan penjajah. Tetapi dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah Belanda sangat ketat mengawasinya.

Dalam kajian ini, akan mendeskripsikan politik santri tradisional pada masa penjajahan, masa kemerdekaan dan orde lama, masa orde baru dan masa orde reformasi. Hingga upayanya menempatkan diri dalam struktur kekuasaan Legislatif dan Eksekutif, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat.

Kekuasaan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di Propinsi maupun di Kabupaten. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu

gabungan keanggotaan DPR dengan DPD yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Kekuasaan Legislatif memiliki fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan dan sebagai sarana pendidikan politik (Moh. Kusnadi 1995: 247). Lembaga ini yang menyerap banyak santri tradisional, mulai dari Kabupaten, Propinsi hingga di Pusat.

Sedangkan kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh Lembaga Kepresidenan, wakil Presiden dan para Menteri, yang memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang, melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta menjaga pertahanan, ketertiban dan keamanan negara, maka Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, dibawah kekuasaan Presiden. Begitu juga di tingkat Propinsi dan Kabupaten, Gubernur dan Bupati yang menjadi Kepala Pemerintahan. Lembaga ini juga yang sudah mulai dilirik oleh santri tradisional, antara lain yang berhasil menjadi Bupati di Pasuruan, Blitar, Gresik dan Bangkalan. Adapun di tingkat pemerintahan pusat, minimal Wakil Presiden yang dapat di duduki oleh santri tradisional, semisal K.H. Hasyim Muzadi atau KH. Shalahuddin Wahid di masa yang akan datang.

Politik Santri Tradisional Pada Masa Penjajahan

Sebenarnya, istilah santri atau kyai politik itu tidak ada dalam kamus maupun dalam literatur Ilmu Politik, tetapi istilah tersebut, digunakan untuk memudahkan sebutan terhadap seseorang yang dianggap

sebagai kyai sekaligus sebagai politikus, semisal KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Politik santri tradisional, diwadahi oleh organisasi (jam'iyah) NU, yang sejak awal berdirinya, dilator-belakangi oleh percaturan politik dunia, dimana bangsa-bangsa Eropah membagi-bagi negeri di Asia dan Afrika untuk dikuasai dengan cara menjajah, termasuk bangsa Belanda menjajah Nusantara Indonesia. Dari segi aqidah Ahli Sunnah wa al-Jama'ah, yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia, terancam juga oleh gerakan Wahabi yang dilancarkan oleh kebijakan Raja Ibnu Su'ud, maka lahirlah Jama'iyah NU di Surabaya pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah (Nasir Yusuf, 1994, 91). Maka dari sinilah terbentuk kaderisasi bagi santri tradisional, untuk berkiprah dalam bidang kemasyarakatan dan bidang politik, untuk mengontrol dan menolak kebijakan pemerintahan Belanda dan Jepang. Bahkan tidak sedikit yang berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara.

Di awal abad 20, penduduk pribumi sudah mulai menyadari pentingnya mengorganisir diri dalam satu wadah organisasi, untuk menghadapi bangsa penjajah. Maka berdirilah perkumpulan Budi Utomo di tahun 1908, Syarikat Islam (SI) 1912, NU 1926, PNI 1927 dan sebagainya, untuk menyikapi bahaya dan ancaman yang ditimbulkan oleh kolonial (Bambang Sunggono: 1992:7). NU didirikan di Surabaya, dengan sebuah pola dasar

perjuangannya, yang disebut Khittah 1926 (A. Gaffar Karim: 1995, 7). Di awal berdirinya, NU bukan merupakan partai politik, melainkan hanya sebuah "*Jam'iyah diniyah*", yang sering diterjemahkan dengan istilah organisasi sosial keagamaan. Tetapi dalam perkembangannya, sering menunjukkan aktifitasnya yang bernuansa politik; antara lain kegiatannya menggalang ide-ide nasionalisme kepada umat Islam, untuk melawan kolonial di saat itu (Choirul Anam: 1985, 24). Takkala NU bersama-sama dengan kelompok Muhammadiyah, SI, al-Irsyad dan Persis mendirikan organisasi yang diberi nama dengan "*Majlis Islam A'la Indonesia* (MIAI) pada tahun 1937, santri tradisional dari kalangan NU semakin aktif menyuarakan tuntutan Indonesia berparlemen kepada pemerintah Belanda, bersama dengan anggota MIAI lainnya dari kalangan SI dan Persis, maka ide-ide tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi di jam'iyah oleh tokoh-tokoh NU yang aktif di MIAI, meskipun pada akhirnya, NU keluar dari organisasi tersebut, hingga menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Fenomena politik santri tradisional di masa penjajahan, sangat berbeda dengan masa sesudah merdeka. Di masa tersebut, disikapi oleh santri dengan melakukan perlawanan terhadap kolonial, karena dominasi kekuasaan penjajah terhadap kaum pribumi semakin menjerat kepentingan dan hak-haknya, sehingga peraturan yang dibuat penguasa penjajah, semakin banyak yang merugikan

masyarakat pribumi. Aturan atau hukum, disebut oleh Belanda sebagai Ordinansi, yang membeikan legitimasi kepada pemerintah Belanda, untuk membuat suatu kebijakan, yang dirasakan oleh pribumi sebagai suatu undang-undang yang memberatkan hajat hidup mereka, antara lain Ordinansi Hak Waris, Perkawinan, Haji serta Ordinansi guru tahun 1905, lalu diperbaharui lagi dengan Ordinansi guru No. 219 Tahun 1925 (Soleh, Hayat, 1995, 27). Ordinansi guru tersebut, lebih banyak dirasakan oleh para santri tradisional, karena menekankan pembatasan yang sangat ketat bagi guru-guru di Pondok Pesantren, karena seorang guru agama yang akan mengajar, harus lebih dahulu mendapatkan surat ijin dari Bupati, sedangkan surat tersebut, sangat sulit didapatkan dari pemerintah.

Sebenarnya pendirian Pondok Pesantren di pelosok desa yang sangat terpencil dari kota, disebabkan karena sikap uzlah para kyai dengan santrinya, untuk menghindari peraturan pemerintah Belanda yang sangat ketat membatasi gerak para guru-guru agama mengajar di madrasah. Lalu mendirikan Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengajaran agama, serta berfungsi sebagai Lembaga pembinaan dan pengkaderan masyarakat pribumi, untuk melawan penjajah. Keberanian para ulama mengundang resiko yang sangat rawan, karena Belanda memandangnya sebagai sikap yang melawan pemerintah, namun resiko apapun, tidak akan mengurangi

upaya untuk menggerakkan dan mengumumkan bahwa Belanda adalah penjajah dan musuh bagi seluruh masyarakat pribumi.

Politik Santri Tradisional Pasca Kemerdekaan

Santri dari NU banyak menerima ilmu dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia. Dari keterampilan tersebut, kemudian santri melahirkan milisi-milisi revolusioner Hizbullah dan Sabilillah (Choirul Anam: 1985, 119). Di awal kemerdekaan, milisi inilah yang turut melakukan perjuangan fisik, untuk mempertahankan kemerdekaan bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yahya Muhaimin menyebutkan, bahwa sebenarnya TNI merupakan gabungan dari KNIL, PETA dan beberapa kelompok milisi, termasuk di dalamnya milisi Hizbullah dan Sabilillah (1982, 31). Perwira TNI yang berasal dari unsur KNIL, antara lain Nasution, Simatupang, Urip Sumoharjo. Sedangkan dari unsur PETA, antara lain Sudirman, Bambang Sugeng, Ahmad Yani dan Suharto.

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, berdirilah Masyumi sebagai satu-satunya Partai Politik Islam, yang didalamnya termasuk unsur NU bersama-sama dengan ormas Islam dari kalangan santri modernis. Untuk menguatkan komitmen umat Islam, bahwa Masyumi merupakan satu-satunya Partai Politik Islam, maka diadakan Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7-8

Nopember 1945 (Deliar Noer: 1987, 47).

Wadah perjuangan santri tradisional terbuka luas, takkala Masyumi telah berdiri, dengan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Lalu Hizbullah dan Sabulillah juga ditempati milisi santri tradisional untuk berjuang dengan mengangkat senjata, demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamlirkan, karena sebenarnya Belanda ketika itu masih ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Bahkan membonceng sekutu-sekutunya untuk kembali berkuasa, maka meletuslah perlawanan terhadap penjajah di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945, yang disebut Hari Pahlawan 10 Nopember, termasuk juga di beberapa tempat lain di Indonesia. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945, terjadi rapat para ulama NU se-Jawa di Kantor NU jalan Bubutan IV/2 Surabaya, untuk memberikan semangat juang dan memutuskan, bahwa Hizbullah dan Sabilillah wajib mengangkat senjata bersama-sama dengan BKR, TRIP dan Barisan Pemberontak pimpinan Bung Tomo, untuk melawan tentara Inggris pada tanggal 10 Nopember 1945 (Soleh Hayat: 1995, 99).

Melihat gelagat penjajah yang ingin kembali berkuasa di Indonesia, maka Pondok Pesantren yang semula berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan Islam, bergeser engan menambah fungsinya sebagai tempat berlangsungnya kaderisasi pemuda dan santri, untuk menghadapi penjajah yang dipelopori oleh Kyai pengasuhnya: misalnya di Asembagus-

Situbondo kita kenal KH. As'ad Syamsul Arifin, di Jember kita kenal KH. Dofir Salam dan KH. Munir di Bondowoso, KH. Mohammad Hasan di Genggong dan KH. Zaini Mun'im di Paeton-Probolinggo, KH. Junaidi di Genteng-Banyuwangi, KH. Umar di Sukowono-Jember, KH. Masykur di Malang, KH. Munasir Ali di Mojosari-Mojokerto, KH. Bisri Syamsuri di Jombang, KH. Ruhayat di Cipasung-Tasik Malaya dan sebagainya.

Suatu kelemahan yang melekat pada diri santri tradisional dalam kompetisi politik, adalah sikap yang tidak ambisi dan keikhlasan serta terlalu percaya terhadap orang lain, baru mereka dapat menyadari kelemahannya, bila mereka ditelikung. Dan faktor ini pula yang menyebabkan mereka selalu kalah dalam suatu koalisi, misalnya ketika bergabung dalam MIAI, Masyumi dan Partai PPP, selalu berakhir dengan pengusuran mereka dalam pembagian peranan. Kelemahan juga yang dialami takkala lasykar Hizbullah dan Sabilillah dianjurkan untuk mendaftarkan diri menjadi TNI di awal pemerintahan Orde Lama, bersama-sama dengan milisi pejuang yang lain. Karena santri tradisional tidak memiliki keambisian dalam masalah tersebut, ditambah lagi dengan tidak memiliki ijazah formal yang merupakan salah satu persyaratan pendaftaran, maka akhirnya kesempatan tersebut diisi oleh orang-orang sekuler dan Kristen.

Penyesalan baru muncul dikalangan santri tradisional, takkala terjadi peralihan pemerintahan dari Orde lama ke Orde Baru,

di mana peran tentara sangat dominan, yang hampir seluruh sektor pemerintahan dikuasai, mulai dari Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati dan sektor lain dikuasai semuanya. Tentu saja, tentara yang berlatar belakang santri tradisional tidak ada, sehingga penentu kebijakan politik di Indonesia tidak ditentukan oleh politisi muslim tradisional, melainkan ditentukan oleh politisi sekuler. Maka lagi-lagi kepentingan politik santri tradisional di jaman Orde Baru, sangat terpuruk, padahal tatkala Indonesia di landa ancaman, baik ketika perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, maupun tatkala G-30 S. PKI tahun 1965, santri tradisional selalu berada di barisan terdepan bersama-sama dengan tentara.

Politik Santri Tradisional di Era Orde Lama

Satu hal yang menjadi ciri khas pada Era Orde Lama, yaitu bentuk-bentuk demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia ketika itu, yang selalu diperdebatkan dalam parlemen, karena masing-masing Partai Politik berusaha untuk memenangkan aspirasi politiknya dalam pengelolaan negara. Sejak tahun 1945-1959, bangsa Indonesia mempraktekkan Demokrasi Parlementer, yang cenderung Liberal, dengan memperlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada parpol untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga kekuasaan parlemen lebih kuat dari kekuasaan pemerintah.

Kabinet jatuh-bangun, akibat diberlakukannya Undang-Undang tersebut, misalnya:

1. Kabinet Natsir, mulai tanggal 6 September 1950 hingga 26 April 1951.
2. Kabinet Soekirman, mulai tanggal 27 April 1951 hingga 2 April 1952
3. Kabinet Wilopo, mulai tanggal 3 April 1952 hingga 31 Juli 1953
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo, mulai tanggal 1 Agustus 1953 hingga 11 Agustus 1955
5. Kabinet Burhanuddin Harahap, mulai tanggal 12 Agustus 1955 hingga 23 Maret 1956
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II, mulai tanggal 24 Maret 1959 hingga 8 April 1957
7. Kabinet Juanda, mulai tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959

Dengan ketidak-stabilan pemerintah pada saat itu, sehingga para Kabinet (Perdana Menteri dan Menteri-nya) tidak sempat lagi membuat rencana pembangunan, karena umur jabatannya sangat pendek (S. Toto Pandoyo: 1981: 130).

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer, lalu mengawali Demokrasi Terpimpin yang cenderung berbalik dari Demokrasi Liberal yang didominasi oleh parlemen menjadi dominasi peran Presiden yang sangat kuat. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat dari hasil pemilihan umum tahun 1955, dapat dibubarkan dan diganti oleh Presiden Sukarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang

keanggotaannya diangkat sendiri oleh Presiden, Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin. Sejak 1959-1965, di mana saat itu berakhirnya pemberontakan G-30 S. PKI.

Peran politik santri tradisional, pada saat Demokrasi Parlementer, masih kalah dari peran politik dari Islam modernis, terbukti dari seluruh Perdana Menteri pada dekade tahun 1945-1959, hanya dapat diduduki oleh kader partai Masyumi dengan PNI. Santri tradisional dari Partai NU, PSII dan Perti tidak pernah dapat merebutnya. Setelah Pemilu 1955, wakil perdana menteri II diserahkan kepada Idham Chalid, lalu masih mendapatkan empat jabatan menteri, misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Sosial, dan Menteri Agama. Kemudian di Parlemen, santri tradisional yang mewakili Partai NU masih memperoleh 45 kursi, dari perolehan suara sebesar 6.955.141 (18,4%) pada Pemilu 1955.

Kiprah politik santri tradisional semakin kuat, setelah beberapa Partai dibubarkan oleh Bung Karno, termasuk Partai Masyumi, sebagai Partai Islam terbesar ketika itu.

Setelah dibubarkan Partai Masyumi, PKI semakin berani menghadapi umat Islam secara terbuka, sedangkan Partai NU hanya dapat menghimpun umat Islam dari warga NU sendiri, untuk menghadapi pengaruh PKI di desa-desa. Untuk mengimbangi upaya PKI mempengaruhi masyarakat, dengan memberikan latihan kemiliteran, maka Subchan ZE merefleksikan sikap Partai NU dengan cara

mengkoordinasi gerakan HMI, PMII, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah untuk menghadapinya, hingga terjadi percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI, tanggal 30 September 1965.

Ada anggapan yang keliru terhadap NU, ketika Bung Karno mendeklarasikan Nasakom (Nasional Agama Komunis), dimana kata Nasional diwakili oleh PNI, Agama diwakili oleh Partai NU dan Komunis diwakili oleh PKI. Anggapan itu diwakili oleh eks-Masyumi, lalu beranggapan bahwa Partai NU dengan PNI yang memberikan ruang gerak kepada PKI untuk mengembangkan pengaruhnya di Indonesia.

NU sejak lahirnya, selalu menunjukkan toleransi dan sikap akomodatifnya terhadap penguasa dan Partai Politik yang berbeda asas perjuangan dengannya, selama penguasa dan Partai Politik itu memperjuangkan kepentingan negara. Tetapi tatkala tidak, maka NU baru menentukan sikap untuk melawannya. Jatuhnya kekuasaan Bung Karno dan perlawanan terhadap PKI, NU termasuk berada di barisan depan bersama-sama dengan TNI. Persoalan Nasakom, dimana Partai NU ada di dalamnya, tidak menjadikan penghalang bagi NU dan santri tradisional yang bergabung di dalamnya, untuk melawan pemerintah Orde Lama dengan menuntut pembubaran PKI. Berarti politik santri tradisional pada era tersebut, tidak hanya berjuang di Parlemen lewat DPR-GR, di tingkat Nasional, di tingkat Propinsi dan Kabupaten, tetapi santri di luar

struktur Parlemen, selalu menyatukan diri, untuk menuntut pembubaran PKI dan mendesak diadakannya pergantian pemerintahan yang baru, dengan cara unjuk rasa bersama-sama dengan mahasiswa.

Politik Santri Tradisional di Era Orde Baru

Orde Lama memberlakukan Demokrasi Parlementer yang liberal dan Demokrasi Terpimpin yang otoriter. Lalu Orde Baru memberlakukan Demokrasi Pancasila, yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Demokrasi Terpimpin. Tanggal, 1 Oktober 1965, merupakan tonggak kemenangan TNI mematahkan gerakan PKI, maka tanggal tersebut selalu diperingati oleh pemerintah Orde Baru, sebagai hari Kesaktian Pancasila. Pemerintah sangat meyakini, mengagumi Pancasila, bukan saja karena didalamnya terdapat kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia, tetapi juga karena ia mampu membuktikan kebenarannya, teruji keampuannya dan terjamin akurasinya dalam masyarakat, sebagai bangsa yang beraneka ragam, seperti bangsa kita (Syarwan Hamid; 1997: 66).

Dari nilai Pancasila dan wawasan UUD 1945, pemerintah Orde Baru, merumuskan langkah-langkah dan strategi pembangunan secara bertahap, yang dimulai sejak 1969, yang bersifat konsisten dan berkesinambungan. Orde Baru dengan caranya sendiri, meletakkan pembangunan politik di atas tatanan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

konsekwen, karena ia merupakan koreksi total terhadap kekurangan sistem politik sebelumnya, yaitu ketidak mampuan pemerintah Orde Lama menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru yang melakukan koreksi terhadap Pemerintah Orde Lama, dalam hal mekanisme kepemimpinan Nasional lima tahunan, dengan mengadakan Pemilu dan sidang umum MPR, sebenarnya tidak mengantarkan aspirasi politik masyarakat, kecuali hanya merupakan akal-akalan dari elit politik, untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia, bahwa bangsa Indonesia dibawah kepemimpinan Suharto, betul-betul telah menjalankan agenda demokrasi.

Umat Islam yang berasal dari Muslim tradisional yang mayoritas berada di desa-desa, hanya dapat diharapkan untuk mendukung Golkar sebagai kendaraan politik Orde Baru, dan dibatasi untuk menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Menjadi kepala Sekolah Dasar (SD) saja sangat sulit, apalagi dengan kedudukan jabatan yang lebih tinggi, oleh karena itu, pegawai negeri yang kebetulan berlatar belakang dari keluarga NU, sangat takut menunjukkan identitasnya. Tidak berlebihan, bila dikatakan, bahwa peran politik santri tradisional di Era Orde Baru, tidak ada, dibandingkan dengan tokoh dari muslim reformis, yang diakomodir oleh pemerintah; baik di Lembaga Legislatif, maupun di Eksekutif. Maka tidak heran, kalau Gus Dur sering mengatakan di forum

ilmiah, bahwa NU dipinggirkan selama 32 tahun oleh pemerintah Orde Baru, tidak pernah membuat protes dalam bentuk apapun, tetapi kalau orang NU hanya kebetulan mendominasi jabatan di salah satu Departemen, dengan waktu yang relatif pendek, maka ia bisa diteriaki oleh orang lain, dengan berbagai macam protes dan unjuk rasa. Ini yang disadari oleh elit politik dari NU, maka tatkala Orde Baru berakhir dengan jatuhnya Presiden Suharto, maka ada keinginan keras bagi warga NU untuk mendirikan sayap politik, untuk mewadahi elit-elit yang ingin berkiprah dalam politik praktis, maka lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan oleh pengurus NU. Begitu juga halnya Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Nahdatul Ummah (PNU) dan Partai Sunni, kesemuanya ini merupakan partai yang didirikan oleh orang NU diluar struktural kepengurusan NU.

Politik Santri Tradisional di Era Orde Reformasi

Era reformasi di mulai setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada akhir bulan Mei 1998, lalu lahirlah peta kekuatan politik baru di pentas nasional. Hampir semua kekuatan massa, ingin mendirikan partai politik ketika itu, terutama sekali kekuatan massa yang pernah ditekan ketika pemeritahan Orde Baru. Pada awal dibukanya kran kebebasan berpolitik, tercatat 141 partai politik yang telah terdaftar di KPU, tetapi setelah diseleksi seluruh persyaratannya, maka tinggal 48

partai yang ikut berkompetisi dalam pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 yang lalu. Tidak ketinggalan partai yang berbasis massa Islam, turut serta mendirikan partai politik baru; misalnya PKB, PAN, PBB, PKU, PNU, Partai Sunni, PNU, PSII, PK dan sebagainya.

Pada pemilihan umum 1999 yang lalu, dimana PDIP sebagai representasi kaum abangan memenangkan pertarungan, maka bermunculan beberapa gagasan untuk menyatuhkan parpol yang berbasis massa Islam, untuk menguasai jumlah kursi orang abangan di DPR-RI, agar semuanya dapat signifikan dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam (Faisal Ismail; 2002, 155).

Hasil pemilihan umum 2004 yang lalu, di mana partai yang berbasis Islam mengalami penurunan perolehan suara, kecuali PKB yang masih relative bertahan, maka ada upaya untuk merealisasi konsep di tahun 1999, agar partai yang berbasis Islam dapat bersatu menghadapi partai yang berbasis nasional. Tetapi hal tersebut tidak akan mungkin terjadi, lantaran PDIP menggandeng KH. Hasyim Muzadi dari PB NU sebagai calon Wakil Presiden.

Santri tradisional yang nota bene berasal dari NU, tidak akan mau berkoalisi dengan partai yang berbasis Islam yang lain, karena mereka selalu menjadi trauma dari kegagalan bersama-sama dengan santri modernis membangun perjuangan, yang selalu berakhir dengan posisi yang terpinggirkan. Ketika bersama-sama dengan kelompok Islam yang lain

mendirikan MIAI di tahun 1937, disusul dengan pendirian Masyumi di tahun 1945, lalu terjadi fusi partai yang berbasis Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana Partai NU termasuk didalamnya, maka sejak santri tradisional yang selalu diperlakukan tidak adil oleh partai, padahal disisi lain, selalu dituntut untuk menghimpun massa pendukung yang sebanyak-banyaknya untuk partai.

Santri tradisional sudah bersepakat, bahwa tidak akan ada lagi upaya untuk menyatukan diri dengan pihak yang sudah beberapa kali menelikung dalam partai, terbukti dengan tampilnya KH. Hasyim Muzadi sebagai calon Wakil Presiden dari PDIP. Begitu juga KH. Solehuddin Wahid, haya mau dicalonkan sebagai Wakil Presiden dari Partai Golkar, bukan calon dari Partai yang berbasis Islam.

Tentang kiprahnya di Legislatif, santri tradisional banyak terserap di PKB dan PPP, meskipun DPR dan DPD belum dilantik. Sedangkan lembaga Eksekutif (pemerintahan), kita masih perlu menunggu perkembangan dari hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang.

Kesimpulan

Artikel tentang "Politik Santri Tradisional Dan Keikut-Sertaannya Dalam kekuasaan Negara", disimpulkan sebagai berikut:

1. Santri tradisional adalah ahli agama Islam atau Kyai yang masih sangat terikat dengan pemikiran keagamaan para

Ulama Fiqh, Tafsir, Hadis, Tauhid dan Tasawuf yang hidup antara abad ke 7 hingga abad ke 13 M.

2. Politik santri tradisional pada masa penjajahan, ditandai dengan sebagian ada yang selalu mengontrol kebijakan pemerintah penjajah, dan sebagian yang lain ada yang melakukan perlawanan fisik bersama-sama dengan kelompok pemberontak yang lain.
3. Politik santri tradisional pasca kemerdekaan, ditandai dengan kiprahnya sebagai anggota. Parlemen dari unsur Partai Masyumi, dan sebagian lagi melebur diri sebagai pejuang fisik sebagai laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan.
4. Politik santri tradisional di masa Orde Lama, ditandai dengan kiprahnya di DPR-GR dan ada beberapa lagi yang terserap di bidang pemerintahan; baik sebagai Menteri, maupun sebagai Kepala Daerah.
5. Santri tradisional di masa Orde Baru, sangat memprihatinkan, karena tidak diberi peranan dalam bidang politik, kecuali hanya boleh ikut berpartisipasi di Golkar sebagai perantara untuk mengajak masyarakat Islam tradisional mendukung Partai tersebut.
6. Pada masa reformasi, santri tradisional sudah mulai lagi banyak berkiprah di bidang politik; baik sebagai anggota DPR maupun sebagai pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anam, Choirul, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Solo, Jatayu.
- Bahar, Ahmad, 1999, *Biografi Kyai Politik Abdurrahman Wahid*, Jakarta, Bina Utama.
- Dhofir, Zamakhsyari, 1985, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*.
- Gibb, HAR, 1947, *Modern Trends in Islam*, Chicago, The University of Chicago Press.
- Hamid, Syarwan, 1997, *Sosial Politik ABRI dalam Pembangunan Politik di Indonesia* (M. Dawan Raharjo; Editor Reformasi Politik). Jakarta Internasa.
- Hayat, Soleh dkk., 1995, *Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, Surabaya, PW. NU.
- Hurgronje, Snouck, 1963, *Modernization in a Muslim Society*, (The Indonesian Case), Bombay, Quest Vol.39.
- Ismail, Faisal, 2002, *Pijar-Pijar Islam (Pergumulan Kultur dan Struktur, Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI)*.
- Kusnadi, Moh, dkk., 1995, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Muhaimin, A. Yahya, 1982, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Gajah Mada, University Press.
- Noer, Deliar, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta, Pustaka Utama.
- Pandoyo, S. Toto, 1981, *Ulasan Terhadap UUD 1945*, Yogyakarta, Liberty.
- Suminto, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP-3ES.
- Sunggono, Bambang, 1992, *Partai Politik*, Bandung, Humaniora Utama Press (HUP).
- Yusuf, Nasir, 1994, *NU dan Gus Dur*, Bandung, Umanior Utama Press (HUP).
- _____, 1994, *NU dan Rekayasa Politik*, Bandung, Umaniora Utama Press (HUP).